



**Pekerja menyelesaikan** pekerjaan revitalisasi saluran air hujan (SAH) di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Umbulharjo, Kota Jogja, Rabu (29/10). Pemkot Jogja menargetkan pembangunan drainase ini selesai pada 15 Desember 2025.

► PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

## Nir DAK, Perbaiki Jalan Andalkan APBD

**UMBULHARJO-** Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dipastikan tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur di 2026. Seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta drainase sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Stefani Yulindriani  
[stefani@harianjogja.com](mailto:stefani@harianjogja.com)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Umi Akhsanti, menyampaikan efisiensi anggaran di tingkat Pusat membuat Kota Jogja tidak lagi memperoleh DAK, termasuk untuk bidang jalan yang selama ini menjadi prioritas pembangunan. "Tahun depan kemungkinan tidak dapat

- Untuk 2025, anggaran hanya sekitar Rp10 miliar, fokus pada pemeliharaan kerusakan ringan.
- Alokasi anggaran di bidang sumber daya air, perumahan dan permukiman dibagi merata sesuai kebutuhan prioritas.

DAK, jadi seluruhnya menggunakan APBD 2026. Untuk 2025 kami berharap mendapat DAK [untuk rehabilitasi] jalan sekitar Rp28 miliar, untuk beberapa ruas jalan utama serta rehabilitasi saluran drainase. Namun ternyata terkena efisiensi juga," ujarnya, Minggu (2/11). Umi menjelaskan ruas jalan yang sebelumnya diusulkan dalam program DAK antara lain Jl. Magelang, Jl. Abu Bakar Ali, Jl. Yos Sudarso, dan Jl. Kyai Mojo. Dengan tidak adanya DAK, DPUPKP hanya bisa fokus pada kegiatan pemeliharaan dengan menggunakan tenaga swakelola dari DPUPKP Kota Jogja.

Meski demikian, beberapa pekerjaan yang telah berjalan tetap dilanjutkan, termasuk rehabilitasi berkala di Jl. Sugeng Jeroni senilai sekitar Rp5 miliar, serta sejumlah pekerjaan jalan dan drainase lain yang bersumber dari anggaran murni. "Ruas-ruas yang sudah dalam proses pembangunan seperti Jalan Prof. Dr. Soepomo, Umbulharjo, tetap berjalan sesuai rencana. Untuk pembangunan baru, kami menyesuaikan dengan kemampuan APBD," katanya. Umi menuturkan, pembahasan APBD Kota Jogja 2026 masih berlangsung hingga saat ini. Dia memastikan alokasi anggaran di bidang sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta bangunan masih akan dibagi secara merata sesuai kebutuhan prioritas daerah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005